

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Mekanisme Biaya Formula E Tak Kunjung Diaudit

◆ PDIP Tuding Pemprov DKI Tak Jelas

JAKARTA (Poskota) - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuding Pemprov DKI tidak jelas dalam memberi penjelasan audit keuangan Formula E. Pasalnya, hingga saat ini mereka tak kunjung mempublikasikan mengenai pembiayaan mekanisme Formula E.

"Kepastian dilaksanakan atau tidak audit Formula E tidak jelas. Hingga saat ini hasil audit tak kunjung dipublikasikan, padahal perhelatan sudah selesai hampir 2 bulan," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, Senin (1/8).

Menurut Gilbert, kerugian Formula E akan jelas terjadi

jika Pemerintah DKI dapat kooperatif dan profesional. "Kerugian yang terjadi akan jelas bila diaudit, sehingga tidak menjadi polemik. Kejujuran dan profesionalisme auditor diperlukan agar semua jelas," kata Gilbert.

Maka dari itu, Legislator Kebon Sirih ini meminta kepada Pemerintah DKI untuk segera melakukan audit terkait mekanisme anggaran Formula E ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Sebaiknya audit lebih baik bila dilakukan auditor khusus yang dari BPKP," imbauya.

Dikatakan Gilbert, BPKP lebih menger-

ti aturan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. "Mereka memiliki wewenang untuk melihat semua hal yang berkaitan dengan penyelenggara seperti MoU awal di New York dan revisi yang di Singapura, kontrak dengan pihak lain, sumber biaya dan hal lainnya yang tidak dibuka ke DPRD," tandas Gilbert.

Menurutnya, besarnya biaya yang dikeluarkan saat tender dan pembengkakan biaya, padahal tender sudah disepakati, akan lebih dipahami auditor BPKP. Tak hanya itu, asal sumber biaya juga harus diperjelas

karena semua sumber biaya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yaitu, Jakarta Propertindo (Jakpro)

"A s a l / s u m - ber biaya juga perlu diperjelas, karena semua biaya dari Jakpro sementara sejak awal sudah dilarang oleh BPK untuk menggunakan uang negara atau APBD," pungkasnya.

Sebagai informasi, ajang balap mobil listrik itu telah menyedot anggaran APBD DKI sebesar Rp 560 miliar untuk membayar commitment fee Formula E. Pasalnya, kegiatan yang punya tujuan bisnis seharusnya tak boleh didanai dari APBD. **(Aldi/Ifn)**